

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan erat yang terjadi antara Rusia dan Ukraina terjalin sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 setelah terjadinya Perang Dingin. Ukraina merupakan salah satu negara pendiri *Commonwealth of Independent States (CIS)*, yaitu organisasi regional persemakmuran negara bekas anggota Uni Soviet yang dibentuk pada awal runtuhnya Uni Soviet. Hal ini menandakan bahwa Ukraina memang memiliki hubungan yang sangat erat dan dekat dengan Rusia dari awal pembentukan organisasi tersebut. Dari sisi geopolitik Uni Eropa menjadikan persaingan sengit Rusia dalam pengaruhnya terhadap Eropa Timur yang membawa Ukraina ke dalam integrasi yang lebih condong atau cenderung mendekat ke arah Uni Eropa. *A partnership and cooperation agreements (PCA)* yang ditandatangani Uni Eropa dan Ukraina pada 14 Juni 1994 dan dilegalkan pada tahun 1998. *The European Union's Partnership and Cooperation Agreement (PCA)* merupakan perjanjian kerja sama yang mengikat hubungan bilateral secara hukum antara Uni Eropa dan negara ketiga (Ukraina) dan kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan sektor ekonomi, yaitu berupa investasi dan perdagangan serta politik Ukraina dan juga penyesuaian terhadap norma dianut oleh Uni Eropa (Poshedin M. C., 2017) inilah awal yang membuat Ukraina dekat dengan Uni Eropa.

Uni Eropa dan Ukraina bersepakat untuk melakukan negosiasi membuat kerja sama baru berupa asosiasi. Proses negosiasi ini menjadi kesepakatan asosiasi yang membutuhkan waktu dari tahun 2007 hingga 2011. Hasil dari perjanjian asosiasi ini mengalami perubahan pada tanggal 30 Maret 2012 setelah selesai didiskusikan kembali oleh pihak Uni Eropa dan Ukraina, maka terbentuklah kerja sama baru yang bersifat

asosiasi yaitu *Association Agreement* (AA). Perjanjian *Association Agreement* (AA) adalah perjanjian internasional yang di sepakati oleh Uni Eropa dengan negara ketiganya (Ukraina), dengan tujuan untuk menyiapkan kerangka hubungan bilateral yang lebih intensif (European Union External Action Service, 2011). Perjanjian asosiasi yang terjadi antara Uni Eropa dan Ukraina ini tertuju pada bidang ekonomi, kelembagaan dan politik yang terjadi antara Uni Eropa dengan negara lain di bagian Eropa Timur dan dalam upaya Ukraina dapat memasarkan hubungan politiknya serta hubungan bidang ekonomi yang lebih dalam di dalam perjanjian asosiasi tersebut. Perjanjian *Association Agreement* (AA) ini juga memiliki peranan penting bagi Uni Eropa untuk membawa negara-negara *Eastern Partnership* agar bisa lebih dekat dengan standar dan norma – norma Uni Eropa.

Perjanjian ini selain berfokus terhadap ekonomi, kelembagaan dan politik berfokus juga terhadap masalah–masalah ekonomi, sosial, pemerintahan dan kebebasan pers serta hak – hak sipil. Pada Desember tahun 2011 Uni Eropa dengan Ukraina mengadakan pertemuan tentang pengesahan Perjanjian *Association Agreement*, namun adanya masalah situasi internal di Ukraina tentang Pemilihan Umum Parlemen maka Uni Eropa harus menunda pengesahan perjanjian tersebut. Pada November tahun 2013 di Lithuania dengan mengagendakan ulang untuk membahas lanjutan dari penundaan yang terjadi pada Desember 2011 maka dengan agenda kali ini Uni Eropa berharap agar perjanjian tersebut akan disahkan oleh Ukraina. Tanpa diketahui oleh kedua pihak antara Uni Eropa dengan Ukraina terjadilah sesuatu yang mengejutkan di antara kedua negara tersebut hal ini dilakukan oleh Presiden Viktor Yanukovich beliau membuat keputusan untuk membatalkannya perjanjian tersebut (*Perjanjian Association Agreement*) (Riegert, 2013).

Dengan terjadinya penolakan perjanjian kerja sama tersebut maka kemudian hal tersebut diprotes oleh pihak oposisi dan menyebabkan konflik secara internal yang menelan korban jiwa dan memicu aksi protes dikota Kiev (The Guardian, 2013) yang

berasal dari kalangan masyarakat Ukraina yang mendesak agar presiden Viktor Yanukovych diturunkan dari jabatannya tersebut dengan alasan untuk menyelamatkan pemerintahan dari tekanan masa. Presiden Viktor diberhentikan karena dianggap sebagai pro-Rusia dan membuat warga Ukraina resah dan pada akhirnya presiden Ukraina dilengserkan dari jabatannya pada Februari 2014 (VOVworld, 2014). Setelah lengsernya presiden Ukraina, terjadinya kekosongan di pemerintahan Ukraina dan membuat kekuasaan terpecah menjadi 2 kubu yaitu pro-Barat (Uni Eropa dan Amerika Serikat) dan pro-Rusia pada tahun 2014. Kekosongan tersebut segera dibentuk pemerintahan baru menunjuk Olexandr Turchynov sebagai presiden sementara serta Arseniy Yatsenyuk sebagai Perdana Menteri sementara. Pemerintahan yang baru dibentuk ini mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat, *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan Uni Eropa. Terbentuknya pemerintahan baru hasil penunjukan parlemen di Ukraina tersebut dianggap pro-Barat oleh Rusia sehingga menyebabkan kemarahan besar dari Rusia. Pada 26 Februari 2014 adanya sejumlah pasukan militer Pro-Rusia yang secara perlahan mengendalikan semenanjung Krimea. Pada tanggal 28 Februari 2014, parlemen mengadakan sidang temporer dan mengakhiri pemerintahan Krimea Perdana Menteri Anatolii Mohyliov dan menggantikannya dengan Perdana Menteri Sergey Aksyonov. Terpilihnya Perdana Menteri ini membuat masyarakat percaya bahwa ia pro-Rusia dan menyebabkan konflik internal di Ukraina (Bima, 2014).

Sergey V Aksyonov meminta bantuan kepada Rusia. Pemerintah Rusia mengirimkan banyak bantuan dan pasukan ke wilayah Krimea. Sebagai negara digdaya, Rusia dapat mempengaruhi Krimea dengan kekuatan politik dan militernya. Rusia memanfaatkan kekuatannya untuk memperluas kembali pengaruhnya di Eropa Timur. Selain memberikan bantuan Rusia juga memiliki maksud lain yang berupa kepentingan politik di wilayah Krimea (Siragih, 2008). Rencana Rusia membuahkan hasil yang terjadi pada 1 Maret 2014, presiden Rusia Vladimir Putin memenangkan untuk menginvasi di negara Ukraina. Pada tanggal 6 Maret 2014 parlemen Krimea

melakukan pemilihan suara untuk bergabung dengan Rusia dan membuat referendum (White & Popeski, 2014). 16 Maret 2014, referendum diselenggarakan di Krimea untuk meninggalkan dan bergabung dengan Rusia (Nahmen, 2014). Referendum ini dianggap tidak sah dan mendapat kecaman dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Ukraina dan penduduk asli Krimea karena bertentangan dengan hukum internasional. 27 Maret 2014 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan solusi berupa Resolusi A/RES/68/262 (Nations United, 2014) tentang Integritas Teritorial Ukraina atas Krimea dan menyatakan bahwa referendum Krimea tersebut tidak sah serta penggabungan Krimea ke dalam Rusia adalah ilegal.

Uni Eropa sependapat dengan Resolusi yang dikeluarkan oleh PBB. Uni Eropa menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Rusia adalah suatu aneksasi dan bersifat ilegal. Setelah berlangsungnya hal tersebut, maka peringatan dan pencegahan yang dilakukan Uni Eropa tidak mendapatkan hasil, maka langkah berikutnya adalah dengan menjatuhkan sanksi kepada Rusia berupa:

- Membatasi akses ke dalam pasar modal Uni Eropa untuk lembaga keuangan utama milik negara Rusia dan anak perusahaan yang didirikan di luar Uni Eropa.
- Beberapa perusahaan energi dan pertahanan Rusia, memberlakukan larangan ekspor dan impor atas perdagangan senjata.
- Larangan ekspor barang berteknologi tinggi serta larangan ekspor barang sipil yang digunakan untuk keperluan militer di Rusia.
- Membatasi akses investasi di Rusia seperti kegiatan memproduksi ataupun eksplorasi minyak, larangan visa dan pembekuan aset (European Council Council of the European Union, 2019).

Sanksi ini diterapkan pada 31 Juli 2014 (Aini, 2018), setelah adanya penerbangan maskapai Malaysia Airlines MH17 dan terjadi penembakan yang jatuh tepat di atas Ukraina dan menewaskan 298 orang, serangan tersebut dilakukan oleh para pemberontak yang pro-Rusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka mendorongnya sebuah pertanyaan: “Mengapa Uni Eropa melakukan embargo ekonomi terhadap Rusia terkait intervensi di Ukraina?”

C. Kerangka Teori

Dalam kasus ini skripsi ini menggunakan beberapa konsep dan teori yang harus sesuai dan tepat untuk melengkapi penelitian, berikut beberapa konsep yang digunakan:

1. Teori Kebijakan Luar Negeri

Definisi mendasar Politik luar negeri adalah teori aksi atau dikenal dengan istilah *action theory*, yaitu kepentingan suatu negara yang ditujukan ke negara lain yang dipilih untuk mendapatkan tujuan tertentu. Kebijakan luar negeri dipandang sebagai kepentingan nasional yang mengandalkan kekuatan (*power*) dan kapabilitas suatu negara, hal ini membuat kebijakan politik luar negeri menjadi penting karena melibatkan kepentingan nasional yang memiliki tujuan utama yang harus dicapai suatu negara yang dapat melibatkan hubungan diplomatik, doktrin, membuat aliansi dan merencanakan suatu tujuan yang berupa jangka pendek maupun jangka panjang.

Pengertian dari kebijakan luar negeri menurut Mark R. Amstutz adalah ‘*as the explicit and implicit actions of governmental officials designed to promote national interests beyond a country’s territorial boundaries*’, yaitu bertujuan untuk menekan tindakan pemerintahannya yang membuat kepentingan negara tersebut dapat mencapai tujuannya dan bisa melampaui batas wilayah negara lain (Sandi, 2017). Sedangkan definisi dari Rosenau adalah bahwa kebijakan luar negeri mendefinisikan usaha suatu

negara melalui keseluruhan sikap serta aktivitasnya untuk menaklukkan dan memperoleh hasil dari lingkungan luar negaranya. Menurut Rosenau definisi ini ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan keberlangsungan hidup sebuah negara. Dari kebijakan luar negeri dapat mengetahui beberapa cara kehidupan, yaitu: kehidupan secara internal (*internal life*) dan kebutuhan secara eksternal (*eksternal needs*), seperti: berambisi, berbudaya, konflik, militer dan kegiatan rutin yang ditujukan untuk mencapai dan menjaga identitas sosial, hukum dan geografi negaranya serta berbagai aktivitas negara lainnya kepada lingkungan negaranya dalam cara memperoleh keuntungan dari apa yang di dapat dalam lingkungan tersebut (Rosenau, Thompson, & Boyd, *World Politics: An Introduction*, 1976). Menurut K.J. Holsti, definisi dari kebijakan luar negeri adalah sikap dari tindakan atau aksi suatu gagasan yang dituju untuk menangani masalah dan membuat perubahan dalam suatu lingkungan (Holsti, 1983). Seperti pada penjelasan di latar belakang bahwa Uni Eropa memerlukan strategi untuk kepentingan negaranya dan memperhitungkan kapabilitas negara lawannya (Rusia) serta memperkirakan apa yang akan di dapat setelah menjatuhkan sanksi tersebut terhadap Rusia, maka dalam studi kasus yang terjadi antara Uni Eropa dengan Rusia ini maka memerlukan sebuah analisis.

2. Teori Tindakan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Pendekatan ini disebut dengan *Rational Decision Making Model* atau yang lebih dikenal dengan *Rational Choice Theory*, model aktor rasional ini percaya bahwa para pembuat keputusan telah menetapkan tujuan yang jelas, mengkaji ulang tingkat urgensinya dan menghitung perkiraan biayanya serta mendapatkan manfaat dari setiap tindakan yang mungkin akan dilakukannya dan memilih yang terbaik diantara yang memiliki banyak manfaat dan mengeluarkan biaya terkecil (meminimalisir pengeluaran biaya) (Goldstein & Pevehouse, 2014). Anggapan dari *Rational Choice Theory* adalah dunia internasional yang menentukan bahwa negara adalah aktornya, maka semua penyusunan dari pembuat kebijakan luar negeri hampir sama dalam

mengutamakan proses pembentukan kebijakannya. Setiap pilihan negara yang membuat proses dapat dilihat sebagai satu kesatuan dengan aktor dalam membuat pilihan, maka setiap satu kesatuan aktor membuat pilihan yang rasional (Jensen, 1982). Sebagai aktor utamanya (negara atau pemerintahan), maka mengasumsikan seperti individual yang berpikir rasional seperti menggunakan perhitungan rasional, maksud dan tujuan serta menggunakan ide untuk mencapai hasil yang selaras dengan tujuan tersebut dengan membuat strategi yang di perhitungkan (Ganti, 2020). Aktor tersebut kemudian mengumpulkan beberapa pilihan, seperti: informasi, risiko berat dan membuat rencana dari setiap aksinya sebagai salah satu cara melihat apa yang akan terjadi dan apa saja keuntungannya. Jika *Rational Actor* gagal atau tidak dapat mendapat keuntungan, maka hal tersebut merupakan kesalahan dalam pengumpulan data informasi, perhitungan salah atau pilihan rasional yang salah (Falkowski, 1974).

Menurut Philippe Le Billon, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan terdiri dari sistem produksi, mobilisasi dan alokasi sumber daya untuk bertahan dari segala serangan, maka semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara tersebut adalah tindakan untuk memenuhi kebutuhan yang dituju untuk menyerang bidang ekonomi negara lain. Tujuan ini untuk mengurangi kekuatan dari negara target dengan melalui cara-cara yang mendorong adanya perubahan kebijakan negara target. Untuk mencapai keberhasilan, maka negara penyerang harus membuat kondisi dalam negeri negara target tidak seimbang sehingga memaksa para elit politik negara target untuk mundur dari jabatannya (Førland, 1993). Pada situasi yang terjadi antara Uni Eropa dan Rusia menjelaskan bahwa dalam memberikan sanksi ekonomi pasca aneksasi kepada Krimea. Negara penyerang (Uni Eropa) menggunakan instrumen berupa embargo ekonomi untuk menyerang perekonomian negara target (Rusia) agar merasa tertekan dan negara penyerang mendapatkan tujuan tersebut.

	Keuntungan Uni Eropa	Kerugian Uni Eropa
Memberikan Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan pasar sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan di Ukraina. • Perluasan ekspor produk dengan nilai tambah tinggi (perspektif jangka panjang). 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan kerja sama Uni Eropa dan Rusia menjadi terancam dan tidak harmoni lagi dan merugikan kepentingan antara negara tersebut.
Tidak Memberikan Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber energi gas dan minyak dari Rusia tetap berjalan karena Uni Eropa bergantung terhadap energi tersebut untuk kepentingan industri dan kepentingannya. • Hubungan perdagangan antara Uni Eropa dan Rusia tetap saling menguntungkan. • Investasi dari Uni Eropa ke Rusia tetap berjalan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rusia bisa memperluas jangkauan di wilayah Sevastopol (Krimea). • Kepentingan Rusia untuk merebut kembali pengaruh Ukraina, dengan setelah terjadinya peristiwa lengsernya presiden Ukraina Yanukovich. • Krimea menjadi fungsi strategis tambahan bagi Rusia, sebagai basis operasi untuk aksi militer (CSIS, 2014).

Ukraina berhasil meningkat produktivitasnya dan penggunaan input yang efisien melalui peningkatan impor teknologi baru dan modernisasi peralatan yang ada. Dalam kondisi seperti itu akses berkembang lebih baik ke pasar Uni Eropa yang berkembang tinggi untuk pengembangan dari Ukraina. Keberhasilan Ukraina dalam beberapa faktor untuk meningkatkan pendapatannya, yaitu: meningkatkan standar kualitas & keamanan produk ke Uni Eropa, peningkatan ekspor dan volume produksi di sektor tertentu (produk tanaman, tekstil), dan penurunan harga pasar untuk barang impor (Buxton, 2016).

D. Hipotesis

Berdasarkan dari pemaparan di atas maka hipotesis dari penelitian ini melalui pendekatan *rational choice*, adalah:

Uni Eropa memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia dengan alasan tindakan tersebut memiliki risiko kerugiannya kecil bagi Uni Eropa, namun bisa berdampak memperlambat ekonomi Rusia sehingga dapat mengubah kebijakan tersebut terhadap Krimea.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan alasan pemberian sanksi ekonomi oleh Uni Eropa terhadap Rusia.
2. Untuk mengetahui dampak dari embargo terhadap Rusia.

F. Batasan Penelitian

Supaya pembahasan ini tidak bergeser dan meluas dari judulnya serta tema pembahasan, maka sebagai penulis akan lebih berfokus pada pembahasan di ruang lingkup tekanan sanksi ekonomi dari Uni Eropa terhadap Rusia pada tahun 2014 – 2015.

G. Metodologi

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengandalkan penjelasan makna data secara jelas yang dilakukan dengan data atau menggabungkan sumber data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Hidayat, 2012). Dengan menggunakan metode ini, penelitian dilakukan dengan cara analisa dan bersifat deskriptif. Selain itu, hubungan sebab-akibat juga digunakan dalam penelitian ini guna

memberikan penjelasan terkait alasan mengapa Uni Eropa memberikan sanksi terhadap Rusia.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini digunakan dalam penelitian dengan metode pengumpulan data, yaitu dengan mengkaji ulang dokumen dari data primer dan sekunder untuk mendukung proses berlangsungnya penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan serta dapat menganalisa indikasi apa yang terjadi.

Teknik pengumpulan dan analisa data dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, diantaranya:

1. Pengumpulan data fenomena yang diteliti
2. Mengolah data yang diperoleh, kemudian peneliti mengolah data untuk dipilih dengan mencari mana data yang cocok dan mendukung penelitian
3. Analisa data, tahapan di mana data yang sudah didapat dan dipilah untuk dianalisa oleh peneliti dengan teori yang cocok sehingga dapat mendukung penelitian.

I. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan adalah jurnal, berita, artikel dan buku yang jelas referensinya (valid) agar dapat dipertanggung jawabkan hasil penelitian ini.

J. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan (Bab ini memaparkan tentang latar belakang dimulainya permasalahan dari pihak-pihak yang terlibat, lalu adanya rumusan masalah yang harus dipecahkan pertanyaannya, hipotesa yang berkaitan dengan jawaban yang diharapkan, teori atau konsep yang digunakan untuk membantu menjawab rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian yang menentukan arah penelitian, metode yang digunakan untuk penulisan skripsi, jangkauan dan sistematika yang digunakan dalam mengurutkan bahasan dalam penelitian ini.)

BAB II: Hubungan Uni Eropa Rusia hingga dijatuhkannya sanksi ekonomi (Bab ini menjelaskan tentang perkembangan hubungan Uni Eropa dan Ukraina, lalu gambaran umum dari dinamika hubungan keduanya hingga munculnya konflik Krimea didalam Ukraina, serta di jatuhkannya sanksi ekonomi.)

BAB III: Menjelaskan Hipotesa (Uni Eropa memberikan sanksi ekonomi kepada rusia atas tindakannya yang dinilai oleh pemimpin Uni Eropa akan mampu memperlemah ekonomi Rusia sehingga akan merubah kebijakannya terhadap Krimea.)

BAB IV: Kesimpulan